

Persepsi Politik Mahasiswa FIS Universitas Negeri Padang

Oleh: Suryanef

ABSTRACT

The role of student politics looks dominant in every phase of political life which formatted in the political system. Students are seen as agents of change, noblesse oblige, the future generation, or as a prophetic minority. This article focuses on the study of the perceptions of student politics FIS UNP. The finding of this research showed that political perception is awakened from the high level of knowledge and critical attitude made it possible that they become reformer actors for the acceleration of the reform agenda. However, based on some indications, there is not impossible that they become destabilizing forces in political life.

Kata kunci: Persepsi politik, peran politik mahasiswa, sistem politik.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia peran politik mahasiswa sebagai kaum intelektual terlihat jelas sepanjang sejarah perjalanan republik ini. Bila diurai lebih jauh, gerakan mahasiswa Indonesia memiliki sejarah panjang, sejak masa kolonial tahun 1908 dan tahun 1928 sebagai generator kebangkitan nasional, masa penjajahan Belanda dan Jepang sebagai pejuang kemerdekaan. Sementara itu masa Indonesia merdeka yang terbagi ke dalam periode waktu sistem politik yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi saat ini, maka dapat dikatakan sebagai elemen pengoreksi dari rezim yang berkuasa. Keseluruhan untaian waktu itu memberikan catatan tersendiri bagi perjuangan gerakan mahasiswa. Di samping itu mahasiswa juga menyanggah segenap peran yang dibebankan kepadanya, yaitu sebagai

agen perubahan, *noblesse oblige*, generasi penerus bangsa, elit masyarakat dan juga sebagai *prophetic minority* atau golongan kecil yang memiliki pandangan futuristik sebelum masyarakat mengetahuinya.

Peran mahasiswa dalam menggulingkan rezim Orde Lama merupakan sukses Angkatan 1966 dan secara subyektif oleh negara dijadikan sebagai standar riil peran mahasiswa. Keberhasilan mahasiswa menumbangkan kekuasaan Orde Lama dan memberi legitimasi terhadap berdirinya Orde Baru menumbuhkan “kesadaran” mahasiswa akan peran mereka sebagai kelompok penekan yang efektif. Sejak itu mahasiswa tampil sebagai dirinya sendiri bukan membawa embel-embel kekuatan politik tertentu. Dengan kondisi ini dapat dikemukakan bahwa pada awal berdirinya Orde Baru telah terjalin hubungan “romantis” antara mahasis-

wa dan negara sebagaimana di masa-masa awal kemerdekaan.

Namun perjalanan panjang kepolitikan Orde Baru telah memisahkan mahasiswa dari hubungan tersebut. Indonesia di era Orde Baru merupakan negara birokratik-militer¹. Birokrasi merupakan aliansi sipil dan militer yang membentuk kekuasaan otonom dan dominan melampaui kedaulatan rakyat. Hampir sama dengan konsep di atas pemerintah Orde Baru juga disebut dengan otoriterisme-birokratik². Kepolitikan Orde Baru ditandai dengan kuatnya militer yang beraliansi dengan birokrat, teknokrat, dan masyarakat bisnis oligopolistik. Sementara kekuatan-kekuatan di luar aliansi tersebut dapat dikatakan dalam posisi lemah.

Gambaran sistem politik Indonesia yang menempatkan masyarakat dalam posisi subordinatif, menjadikan tidak ada lagi ruang bagi kelompok masyarakat manapun untuk bergerak mengadakan suatu gerakan (perlawanan) terhadap kekuasaan negara termasuk dalam hal ini mahasiswa. Mereka dikerangkakan dalam korporatisme negara, depolitisasi dan deideologisasi.

Tindakan-tindakan represif dan berbagai pengekan yang dilakukan rezim Orde Baru pada akhirnya justru memicu kembali maraknya aksi-aksi mahasiswa. Puncaknya terjadi pada tanggal 20 Mei 1998 yang mengakibatkan lengsernya sang otokrat

Soeharto setelah lebih dari 32 tahun berkuasa.

Cerita sukses gerakan mahasiswa tidak akan ada artinya apabila mahasiswa tidak mengawal segenap perubahan-perubahan politik yang terjadi. Contohnya saja pada even pemilu. Sejak reformasi bergulir telah dua kali digelar pemilu legislatif yaitu tahun 1999 dan 2004. Kedua pemilu ini dinilai berjalan lebih demokratis, jujur dan adil walaupun di sana-sini masih banyak kekurangan. Untuk itu menarik diteliti *bagaimana sesungguhnya persepsi politik yang terbangun dalam diri mahasiswa pasca reformasi?*

Sehubungan dengan pertanyaan penelitian, maka perlu dipahami bagaimana konsepsi tentang persepsi politik dan peran ideal politik mahasiswa untuk dijadikan sebagai pijakan analisis. Berbagai ahli psikologi mendefinisikan persepsi sebagai respon terhadap stimulus dan atau objek yang pernah ditangkap oleh panca indra manusia dalam batas-batas sadarnya, dan kemudian menafsirkannya. Maskovitz³ mengatakan, "*perception there is a global or wide range response to set a stimuli or set of stimuli, a response which utilizes and integrates informations beyond that contained in the stimuli it self.*" Sedangkan Branca⁴ berpendapat bahwa "*perception are oriented reactions to stimuli. They have in part been determined by the history and the present attitude of perceiver.*

¹ Robison, Richard. 1987. *Suatu Analisa Tentang Negara Birokratik Militer di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan.

² Mas'ood, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta : LP3ES.

³ Maskovitz, Merle J. 1969. *General Psychology*. Boston: Houghton Mifflin Company.

⁴ Branca, Albert A. 1955. *Psychology: The Science of Behavior*. New York : MacGraw Hill Book Company.

Pandangan-pandangan tersebut menyatakan bahwa persepsi merupakan reaksi yang diorientasikan terhadap stimulus. Persepsi ditentukan oleh pengalaman sejarah dan sikap dari penerima stimulus pada saat ini.

Oleh karena persepsi merupakan suatu proses, maka ia akan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan berkaitan erat dengan kondisi lingkungan di mana kita berada. Dalam hal ini Bryant⁵ berpendapat, *“our perception and our understanding of our environment are very closely linked, and this relationship between what we perceive and what we understand is almost certainly a two-one.”* Dengan demikian persepsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologi termasuk asumsi dasar yang berasal dari pengalaman masa lalu, latar belakang sosial budaya, motivasi, suasana hati, dan sikap-sikap.

Satu hal yang perlu juga diketahui adalah bahwa persepsi berperan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi sikap sekaligus perilaku. Seperti apa yang dikemukakan oleh Kast⁶, *“potential influence filter through personal attitudes via perception, cognition and motivation.”* Artinya pengaruh yang potensial dalam menumbuhkan sikap seseorang adalah melalui persepsi, kognisi dan motivasi. Jadi persepsi mahasiswa terhadap fenomena atau gejala politik akan berpengaruh terhadap sikap politiknya dan

sekaligus perilaku politiknya. Sejalan dengan pengertian ini, Gibson⁷ menegaskan bahwa sikap merupakan faktor yang menentukan perilaku. Karena itu sikap berhubungan dengan persepsi, kepribadian, belajar, dan motivasi.

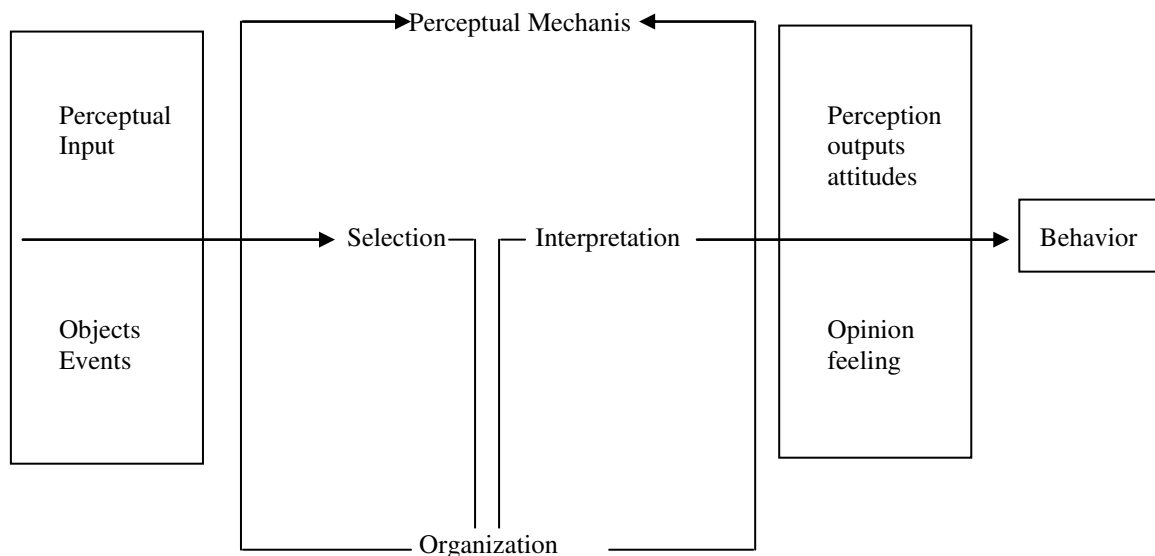
Dalam pembahasan yang lebih terinci, Chung dan Megginson⁸ menggambarkan proses perseptual seseorang sebagai berikut :

⁵ Bryant, Peter. 1974. *Perception and Understanding in Young Children*. London: Methuen & Co. Ltd.

⁶ Kast, Fremond E. & J.E. Rosenzwich. 1970. *Organization and Management*. Tokyo: MacGraw Hill Kogakusha.

⁷ Gibson, J.J. 1970. *The Perception of The Visual World*. Boston : Houghton Mifflin.

⁸ Chung, Karl H. & Leon C. Megginson. 1981. *Organizational Behavior : Developing Managerial Skill*. New York : Row Publishers.



II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Perceptual input di sini pada dasarnya adalah rangsangan yang datang dari luar diri seseorang, dalam lingkungannya. Bentuk-bentuk stimulus akan ditangkap (masuk) pada mekanisme perseptual, yang akan terseleksi melalui proses pengamatan dan pengenalan. Berarti di sini terjadi proses kognisi.

Dengan demikian persepsi diartikan sebagai proses seseorang mengamati suatu objek psikologik dengan kacamata sendiri yang diwarnai oleh nilai dan kepribadiannya. Komponen persepsi yang berperan dalam pengamatan ini adalah komponen kognisi⁹. Selanjutnya, komponen afeksi memberikan evaluasi emosional (senang atau tidak senang) terhadap

objek. Pada tahap selanjutnya, berperan komponen konasi yang menentukan kesediaan/kesiapan jawaban berupa tindakan terhadap objek. Dengan kerangka pemikiran ini, maka persepsi politik mahasiswa terhadap pemilu dan organisasi politik serta dirinya sendiri, dapat dilihat dari pengamatan dan penilaian serta kesiapan bertindak yang akan muncul dalam pemilu.

Dalam pandangan yang sama dan menarik, Bone dan Ranney¹⁰ menyebutnya sebagai *voter cognitive map*. Kedua peneliti politik ini memberi petunjuk bahwa untuk melihat persepsi politik mahasiswa terhadap pemilu harus dikaji semua komponen yang terlibat secara keseluruhan. Pemilu dan pelaksanaannya, partai politik, calon dan

⁹ Mar'at. 1981. Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya. Jakarta : Ghalia Indonesia.

¹⁰ Bone, Hugh A. & Austin Ranney. 1981. *Politics and Voters*. New York : MacGraw Hill Book Company.

isu-isu yang berkembang membentuk suatu kognitif dalam diri mahasiswa.

Dengan demikian persepsi politik mahasiswa dalam penelitian ini adalah pandangan, sikap dan perilaku politik terhadap aktifitas sosial politik, pendapat tentang pemilu, citra diri dalam keterlibatan politik, pandangan tentang figur dan kekuatan partai politik, pendapat tentang saluran dan institusi politik, pandangan tentang isu-isu politik, cita-cita dan harapan masa depan, tokoh politik idola mahasiswa, dan definisi situasi terhadap partai politik.

Dalam konteks kehidupan politik riil menurut Altbach¹¹ impak dari gerakan politik mahasiswa adalah dorongan untuk mengubah kondisi kehidupan yang ada untuk digantikan dengan situasi yang dianggap lebih memenuhi harapan masyarakat luas. Konsep Altbach ini masih sangat umum, sehingga harus dibedakan antara gerakan mahasiswa di negara industri dan di negara-negara dunia ketiga. Hal ini karena adanya perbedaan latar belakang sosial politik.

Arbi Sanit sebagaimana dikutip Altbach¹² mengemukakan bahwa gerakan mahasiswa di negara industri maju muncul ke permukaan sebagai politik desakan (*pressure politics*) agar aspirasi dan perjuangan mereka dipenuhi lewat kebijakan yang dihasilkan oleh dan melalui institusi-institusi politik. Peran mahasiswa yang paling efektif dimainkan dalam bidang sosial dan kebudayaan sebagai gerakan katalis atau ujung tombak

(*avant-garde*). Dengan kata lain, dalam menghasilkan perubahan mahasiswa tidak mengadakan kegiatan politik yang terlibat secara langsung, tetapi berada di luar lembaga politik. Gerakan politik mahasiswa ini lebih merupakan bagian dari aktifitas masyarakat yang ditujukan kepada lembaga-lembaga politik dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Jadi dalam hal ini gerakan mahasiswa hanya melakukan desakan-desakan kepada lembaga politik supaya aspirasi dan perjuangannya terpenuhi.

Sedangkan di negara-negara dunia ketiga, gerakan mahasiswa memiliki hakekat pendorong perubahan politik. Artinya gerakan mahasiswa di sini lebih bersifat politis dan struktural jika dibandingkan dengan gerakan mahasiswa di negara industri yang cenderung bersifat kultural. Kecenderungan berfungsi politisnya gerakan mahasiswa di negara sedang berkembang disebabkan oleh institusi politik belum berfungsi sepenuhnya. Oleh karena itu gerakan mahasiswa dipandang sebagai alternatif terhadap pelaksanaan fungsi lembaga yang bersangkutan¹³.

Secara prinsipil peran strategis mahasiswa dapat dilihat dari posisi sosial dan dampak perubahan yang dihasilkan dalam gerakannya. Sedangkan dalam realisasinya juga ditentukan oleh kondisi masyarakat dan tataran kehidupan yang dijadikannya sasaran upaya perubahan. Dalam pada itu kestrategisan hasil perjuangan mahasiswa ditentukan oleh kecepatan perubahan yang dibawanya. Mahasiswa yang berperan dalam revolusi sosial dipandang lebih

¹¹ Altbach, Philip. 1988. *Politik Mahasiswa : Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini*. Jakarta : Gramedia.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

memiliki peran strategis daripada mereka yang melakukan perubahan melalui revolusi demokrasi (*people power*). Sementara itu peran mahasiswa dalam revolusi demokrasi lebih strategis dari perubahan revolusioner. Dalam kaitan ini mahasiswa Indonesia sedang berkuat dengan perubahan masyarakat ke arah demokrasi.

Terdapat tiga hal menurut Sanit¹⁴ yang menjadi perhatian mahasiswa sebagai agen perubahan menuju demokratisasi. *Pertama*, membangun kerangka berpikir bersama tentang kehidupan politik Indonesia masa depan. *Kedua*, mengembangkan komunikasi dan kerjasama di antara kekuatan-kekuatan masyarakat sipil. *Ketiga*, mematangkan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai pendukung. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (*insight*) yang menyeluruh (*whole*) dan tuntas (*exhaustive*) mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Masri Singarimbun¹⁵) penelitian yang bersifat deskriptif analitis mencoba mencermati gejala sosial secara cermat mengenai satu fenomena sosial tertentu, khususnya fenomena politik. Singkatnya, jenis penelitian

ini berusaha menjawab apa penjelasan yang terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyaan penelitian.

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 250 orang mahasiswa FIS UNP yang pilih secara *stratified proportional random sampling*. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif menggunakan prosentase normal untuk menunjukkan kecenderungan yang terjadi¹⁶.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelacakan terhadap persepsi politik diarahkan pada penjarangan pandangan mahasiswa terhadap beberapa hal yaitu: (a) pendapat tentang pemilu; (b) citra diri dari sudut pengetahuan dan keterlibatan dalam politik; (c) pandangan tentang figur dan kekuatan partai politik; (d) pendapat tentang lembaga legislatif; dan (e) profil kepemimpinan. Satu per satu persepsi mahasiswa FIS UNP terhadap hal tersebut akan dipaparkan berikut ini.

Pandangan tentang pemilu berkaitan dengan persepsi mahasiswa terhadap pemberian suara, apa pentingnya pelaksanaan pemilu, implikasi pelaksanaan pemilu, implikasi kemenangan mutlak suatu partai politik, dan sistem penyelenggaraan pemilu. Temuan penelitian terkait dengan persepsi terhadap pemberian suara dalam pemilu menunjukkan bahwa proporsi

¹⁴Sanit, Arbi. 1998. *Reformasi Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

¹⁵Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Editor). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

¹⁶Yusuf, A. Muri. 1986. *Metodologi Penelitian I*. Padang : FIP IKIP Padang.

antara responden yang menyatakan pemberian suara pada pemilu sebagai hak berimbang dengan yang

menyatakannya sebagai kewajiban. Hal ini terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1
Pandangan Responden Terhadap Pemberian Suara dalam Pemilu

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1.	Pemberian suara dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara	139	55,6
2.	Pemberian suara dalam pemilu merupakan kewajiban setiap warga negara	111	44,4
J u m l a h		250	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Selanjutnya pelacakan terhadap pentingnya pelaksanaan pemilu menunjukkan realitas bahwa pemahaman responden tentang pemilu belum memadai, karena tidak cukup dominan yang menyatakan bahwa pemilu adalah untuk memilih para wakil rakyat untuk duduk di lembaga legislatif. Jawaban responden juga

tersebar pada pelaksanaan pemilu sebagai perwujudan demokrasi, memilih presiden dan wakil presiden, dan pelaksanaan dari ketentuan UUD 1945. Sebaran jawaban cukup berimbang, meski tak satu pun responden yang menyatakan tidak tahu esensi pelaksanaan pemilu. Secara lebih rinci terlihat pada tabel 2.

Tabel 2
Pandangan Responden Terhadap Pentingnya Pelaksanaan Pemilu

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1.	Pelaksanaan pemilu untuk memilih para wakil rakyat.	89	35,6
2.	Pelaksanaan pemilu untuk mewujudkan prinsip demokrasi	66	26,4
3.	Pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden	54	21,6
4.	Pelaksanaan pemilu merupakan pelaksanaan ketentuan UUD 1945	41	16,4
5.	Tidak tahu	0	0
J u m l a h		250	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Sementara itu sebagian besar responden (88,8%) memiliki pandangan yang skeptis terhadap implikasi pelaksanaan pemilu. Responden berpandangan bahwa pemilu tidak mengubah kehidupan sosio-politik masyarakat, tidak mewujudkan kehi-

dupan demokrasi yang sesungguhnya, dan hanya menghambur-hamburkan biaya saja. Hanya sebagian kecil (11,2%) dari responden yang berpandangan bahwa pemilu akan mempercepat jalannya agenda

reformasi. Lebih jauh dapat dicermati tabel 3 berikut.

Tabel 3
Pandangan Responden Terhadap Implikasi Pelaksanaan Pemilu

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1.	Pemilu tidak mengubah kehidupan sosio-politik	98	39,2
2.	Pemilu tidak mewujudkan kehidupan demokrasi yang sesungguhnya	67	26,8
3.	Pemilu hanya menghambur-hamburkan biaya	57	22,8
4.	Pemilu mempercepat jalannya agenda reformasi	28	11,2
J u m l a h		250	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Pada dasarnya pemilu akan menghasilkan partai politik yang keluar sebagai pemenang. Sebagaimana data yang ditunjukkan oleh tabel 4, menyikapi hal ini mayoritas responden (74,8%) berpandangan kemenangan mutlak

dalam pemilu tidak mungkin terjadi karena diikuti oleh banyak partai, tidak seperti halnya pemilu-pemilu Orde Baru. Jawaban 25,2% responden lainnya tersebar ke dalam bisa terjadi (15,2%) dan tidak tahu (10%).

Tabel 4
Pandangan Responden Terhadap Peluang Kemenangan Mutlak Partai Politik dalam Pemilu

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1.	Kemenangan mutlak dalam pemilu multi partai tidak akan terjadi	187	74,8
2.	Kemenangan mutlak dalam pemilu multi partai bisa terjadi	38	15,2
3.	Tidak tahu	25	10
J u m l a h		250	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Selanjutnya kepada responden juga ditanyakan implikasi kemenangan mutlak satu partai politik dalam pemilu. Jawaban yang dikemukakan responden terekam pada tabel 5. Sehubungan dengan hal ini mayoritas responden (88,4%) menyatakan bahwa kemenangan mutlak dari satu partai politik dalam pemilu hanya akan berimplikasi negatif bagi kehidupan penyelenggaraan negara. Argumentasi yang dikemukakan res-

ponden adalah: (1) kegiatan politik sulit terkontrol; (2) korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan semakin meluas; dan (3) keadilan sosial sulit tercipta. Sedangkan 11,6% responden yang berpandangan positif bahwa kemenangan mutlak satu partai politik penting untuk: (1) kesinambungan pembangunan; (2) terjaganya stabilitas politik dan keamanan; dan (3) kehidupan politik akan semakin baik.

Dalam kaitan ini tidak ada responden yang menyatakan tidak tahu terhadap implikasi kemenangan mutlak satu

partai politik terhadap penyelenggaraan negara.

Tabel 5
Pandangan Responden Terhadap Implikasi Kemenangan Mutlak Satu Partai Politik dalam Pemilu Terhadap Penyelenggaraan Negara

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1.	Kemenangan mutlak dalam pemilu berimplikasi positif	29	11,6
2.	Kemenangan mutlak dalam pemilu berimplikasi negatif	221	88,4
3.	Tidak tahu	0	0
J u m l a h		250	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Masih dalam kaitan pandangan responden tentang pemilu, hal berikut yang ditanyakan berhubungan dengan pandangannya terhadap sistem pemilu mendatang sebagaimana ditunjukkan tabel 6. Jawaban yang diberikan responden sangat berimbang yaitu sistem proporsional (36,8%), sistem distrik (32%), dan sisanya 31,2% menginginkan sistem proporsional terbuka.

Alasan yang dikemukakan oleh responden yang berpandangan sistem proporsional adalah lebih praktis, masyarakat terbiasa dengan sistem ini, dan memberikan jaminan bagi terwakilinya seluruh segmentasi

masyarakat. Sementara itu yang menginginkan sistem distrik mengemukakan alasan sistem ini lebih mencerminkan azas demokrasi, menghasilkan perwakilan yang lebih bertanggungjawab dan memperjuangkan daerah yang diwakilinya, serta pembangunan daerah lebih memperoleh perhatian dan merata. Sedangkan yang menyatakan sistem proposional terbuka beralasan bahwa sistem ini sangat cocok bagi masyarakat Indonesia yang plural, menjadikan pemilih lebih rasional, dan menghasilkan perwakilan yang representatif serta sesuai dengan aspirasi pemilih.

Tabel 6
Pandangan Responden Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemilu Mendatang

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1.	Pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional	92	36,8
2.	Pemilu dilaksanakan dengan sistem distrik	80	32
3.	Pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka	78	31,2
J u m l a h		250	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Pengungkapan persepsi politik mahasiswa FIS UNP berikutnya adalah bagaimana pandangan mereka

terhadap citra diri dari sudut pengetahuan dan keterlibatan dalam politik. Mayoritas responden (58,4%)

menyatakan berminat mengikuti perkembangan politik, tetapi tidak ingin terjun ke politik. Selanjutnya 24% menyatakan sama sekali tidak berminat pada politik, 9,6% berminat

aktif dalam kegiatan politik, dan sisanya 8% menyatakan buta politik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh tabel 7.

Tabel 7
Pandangan Responden Terhadap Citra Diri
dari Sudut Pengetahuan dan Keterlibatan dalam Politik

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1.	Buta politik	20	8
2.	Sama sekali tidak berminat pada politik	60	24
3.	Berminat mengikuti perkembangan politik tapi tidak ingin terjun ke politik	146	58,4
4.	Berminat aktif dalam kegiatan politik	24	9,6
J u m l a h		250	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Alasan responden atas ketidak-inginannya untuk terjun ke politik adalah politik identik dengan kelicikan dan penuh intrik, serta takut terhadap konsekuensi politik. Sementara itu tabel 8 memberikan gambaran tentang saluran politik yang diminati responden yang berminat

aktif dalam kegiatan politik. Sebagian besar responden menyatakan ingin bergabung dengan partai politik yang reformis (58,33%), kelompok kepentingan dan LSM (29,17%), dan sisanya 12,5% responden lebih memilih saluran kelompok diskusi sosial politik.

Tabel 8
Pandangan Responden Terhadap Saluran Politik yang Diminati

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1.	Partai politik reformis	14	58,33
2.	Kelompok kepentingan dan LSM	7	29,17
3.	Kelompok diskusi sosial politik	3	12,5
J u m l a h		24	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Persepsi berikutnya adalah pandangan responden terhadap figur dan kekuatan partai politik. Tabel 9-12 berikut pada dasarnya menunjukkan pandangan responden yang dikategorikan ke dalam pertimbangan-pertimbangan etik, pragmatik, afeksi sensoris dan instrumental tentang perilaku tokoh-tokoh politik, pelak-

sanaan janji, tindakan, dan orientasi partai politik.

Pandangan responden terhadap perilaku tokoh-tokoh politik sebagaimana ditunjukkan tabel 9 mengungkapkan bahwa mayoritas responden (76,8%) menyatakan bahwa para tokoh politik berperilaku tidak konsisten dan mengecewakan. Hanya

23,2% saja responden yang politik itu baik. menyatakan perilaku para tokoh

Tabel 9
Pandangan Responden Terhadap Perilaku Tokoh Politik

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1.	Para tokoh politik berperilaku baik	58	23,2
2.	Para tokoh politik berperilaku tidak konsisten dan mengecewakan	192	76,8
3.	Tidak tahu	0	0
J u m l a h		250	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Melalui tabel 10 ditunjukkan bahwa mayoritas responden (70,8%) berpandangan bahwa program yang dijanjikan partai politik dalam kampanye tidak dilaksanakan. Sisa-nya secara berimbang menyatakan dilaksanakan dan tidak tahu, masing-masing dengan proporsi 16% dan 13,2%.

Tabel 10
Pandangan Responden Terhadap Pelaksanaan Janji Partai Politik

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1.	Partai politik melaksanakan janji kampanyenya setelah menduduki lembaga legislatif	40	16
2.	Partai politik tidak melaksanakan janji kampanyenya setelah menduduki lembaga legislatif	177	70,8
3.	Tidak tahu	33	13,2
J u m l a h		250	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Selanjutnya mayoritas responden (67,2%) berpandangan bahwa tindakan partai politik dalam menyikapi agenda reformasi tidak simpatik. Hanya 22,8% responden menyatakan simpatik, dan selebihnya 10% responden menyatakan tidak tahu. Hal ini terangkum pada tabel 11.

Tabel 11
Pandangan Responden Terhadap Tindakan Partai Politik
Menyikapi Agenda Reformasi

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1.	Simpatik	57	22,8
2.	Tidak simpatik	168	67,2
3.	Tidak tahu	25	10
J u m l a h		250	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Dalam hal orientasi partai politik, bagian terbesar dari responden (54%) berpandangan bahwa partai politik lebih berorientasi pada kekuasaan dan

birokrasi. Selebihnya terdistribusi pada jawaban berikut, kepentingan rakyat (20%), primordial-agama (16,8%), dan tidak tahu (9,2%).

Tabel 12
Pandangan Responden Terhadap Orientasi Partai Politik

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1.	Kekuasaan dan birokrasi	135	54
2.	Kepentingan rakyat	50	20
3.	Primordial-agama	42	16,8
4.	Tidak tahu	23	9,2
J u m l a h		250	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Tabel 13 menunjukkan persepsi responden tentang kemampuan lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat. Temuan mengungkapkan bahwa responden meragukan kemampuan lembaga ini. Proporsi terbesar responden yaitu 72% menyatakan ketidakmampuan lembaga legislatif menyelesaikan permasalahan yang dihadapi rakyat. Hanya 25,2% diantara responden yang yakin akan kemampuan lembaga ini, dan 2,8% lainnya menyatakan tidak tahu.

Alasan yang dikemukakan responden adalah lembaga legislatif lebih banyak mengurus diri dan kepentingannya sendiri, tidak mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah, serta tidak merakyat. Sementara itu yang berpandangan positif menyatakan alasan bahwa lembaga legislatif sekarang lebih berdaya, lebih vokal, dan lebih kritis terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Tabel 13
Pandangan Responden Terhadap Kemampuan Lembaga Legislatif

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1.	Lembaga legislatif mampu menyelesaikan permasalahan rakyat	63	25,2
2.	Lembaga legislatif tidak mampu menyelesaikan permasalahan rakyat	180	72
3.	Tidak tahu	7	2,8
J u m l a h		250	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Pandangan responden terhadap profil kepemimpinan sebagaimana yang diungkapkan tabel 14 menunjukkan bahwa mayoritas responden (62%)

lebih menyukai pemimpin tradisional dan kharismatik. Selebihnya, 38% responden lainnya lebih memilih pemimpin birokrasi.

Tabel 14
Pandangan Responden Terhadap Profil Kepemimpinan

No.	Pernyataan	Jumlah	%
1.	Pemimpin tradisional dan kharismatik	155	62
2.	Pemimpin birokrasi	95	38
3.	Lainnya	0	0
J u m l a h		250	100

Sumber : Diolah dari data primer.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diungkapkan, dapat disimpulkan bahwa persepsi politik yang ditunjukkan oleh mahasiswa FIS UNP memberikan gambaran bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup tinggi dan peka terhadap realitas politik yang ada. Hal ini menjadikannya lebih kritis menyikapi persoalan politik sehingga memunculkan sikap *political phobia*. Indikasi ini terlihat dari sedikitnya mahasiswa yang berhasrat terjun ke politik meski pun mereka tertarik mengikuti perkembangan politik yang ada. Hal lain yang menarik adalah kecende-

runan *re-tradisionalisasi* di dalam orientasi kepemimpinan di kalangan mahasiswa padahal dalam kehidupan politik modern dengan kompleksitas persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih menekankan pada adanya kepemimpinan yang bersifat *legal rasional*.

Saran

Mengingat penting dan strategisnya posisi mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu dan kehidupan negara di masa datang, maka pembinaan kesadaran politik terhadap mahasiswa sebagai orang muda merupakan pekerjaan politik yang besar, dan juga merupakan tanggung jawab yang besar pula bagi seluruh kekuatan sosial

politik yang ada. Oleh karena itu partai politik selayaknya membuka peluang yang lebih memungkinkan terwujudnya partisipasi politik yang lebih tinggi dan bertanggungjawab di kalangan mahasiswa, sehingga *political phobia* dapat diredusir.

Kehidupan mahasiswa ditandai oleh cepatnya pertumbuhan aspirasi sosial, politik, serta kultural sementara sistem yang ada selalu kurang mampu mengimbangi hal tersebut. Akibatnya adalah munculnya kecenderungan di kalangan mereka untuk menjadi lapisan ‘pemberang’ dan eksplosif. Karakteristik seperti ini sangat memungkinkan mereka menjadi *destabilizing forces* dalam kehidupan politik. Oleh karena itu partai politik harus dapat menyusun agenda politik yang dapat

mengakomodir aspirasi dan kepentingan politik mahasiswa. Disamping itu partai politik perlu memikirkan sebuah pembinaan serta latihan kepemimpinan yang menekankan pada kepemimpinan *legal-rasional* untuk meredusir kepemimpinan tradisional dan kharismatik di kalangan mereka. Lebih jauh dari itu partai politik harus meningkatkan kepekaannya dalam menangkap isu-isu yang menyangkut kesempatan kerja, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerataan pendapatan, penegakan hukum dan HAM, percepatan agenda reformasi, serta pemulihan ekonomi. Dengan kepekaan semacam itu akan membuka peluang ke arah cairnya alienasi politik di dalam diri mahasiswa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Altbach, Philip. 1988. *Politik Mahasiswa: Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini*. Jakarta : Gramedia.
- Branca, Albert A. 1955. *Psychology: The Science of Behavior*. New York: MacGraw Hill Book Company.
- Bone, Hugh A. & Austin Ranney. 1981. *Politics and Voters*. New York : MacGraw Hill Book Company.
- Bryant, Peter. 1974. *Perception and Understanding in Young Children*. London: Methuen & Co. Ltd.
- Chung, Karl H. & Leon C. Megginson. 1981. *Organizational Behavior: Developing Managerial Skill*. New York : Row Publishers.
- Gibson, J.J. 1970. *The Perception of The Visual World*. Boston: Houghton Mifflin.
- Kast, Fremond E. & J.E. Rosenzwich. 1970. *Organization and Management*. Tokyo : MacGraw Hiil Kogakusha.
- Mar’at. 1981. *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Maskovitz, Merle J. 1969. *General Psychology*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Mas'oed, Mohtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta : LP3ES.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Editor). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Robison, Richard. 1987. *Suatu Analisa Tentang Negara Birokratik Militer di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan.
- Sanit, Arbi. 1998. *Reformasi Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Yusuf, A. Muri. 1986. *Metodologi Penelitian I*. Padang : FIP IKIP Padang.

